

# **Kekuatan Ekonomi Rakyat dan Pengaruhnya terhadap Kemajuan Indonesia**

**Rudi Kogoya**

*Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kristen Indonesia*

*Jl. Mayjen Sutoyo No.2, Cawang, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 13630. Telpn: ( 021 ) 8009190*

## **ABSTRACT**

*In this paper, we will discuss the importance of the people's economic power, especially rural areas in order to strengthen Indonesia's economic power. In a global system full of conflicts of interests each country will try to put forward capabilities in a complex relationship, including the desire to fulfill economic and political needs. One of the key indicators for a country to be classified as a developed or prosperous country, can be observed from how high its per capita income or how far a country manages to solve its poverty's problem. This welfare' measurement should not only be observed only in urban areas, but should also reach much wider areas, including the rural sectors. Ideally, it is not only observed by looking at urban areas, but should also cover all areas including the rural area. As an archipelago state, inequality in development has been the main problem in Indonesia, since it can be found that there are several regions which are more advanced in terms of development compared to the others. The government's willingness to introduce people's economy in less developed areas is needed, by increasing economic cooperation with foreign investment or international markets. Besides, the government had to encourage regional stakeholders to increase their qualifications and capabilities. Since there are a lot of imported goods circulated in local market share, such as imported garlic, to prevent a food crisis in the midst of COVID-19 outbreak. Whether this condition is classified as a sign of deterioration in economic productivity and how far it affects people's economy, it will be discussed comprehensively in this paper.*

**Key Words: People's economic power, State Economic Power, Regions.**

*Dalam tulisan ini, kita akan membahas pentingnya kekuatan ekonomi rakyat, terutama di daerah, dalam rangka memajukan ekonomi nasional. Dalam sistem global yang begitu penuh dengan konflik kepentingan, suatu negara akan berusaha menunjukkan kemampuan masing-masing dalam suatu hubungan. menantang, kepentingan-kepentingan ini tidak dapat dipisahkan dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan politik. Salah satu faktor bagi suatu negara untuk maju atau makmur adalah ketika pendapatan masyarakat tinggi atau bebas dari kemiskinan. Kesejahteraan ini tidak hanya diukur dengan melihat daerah perkotaan, tetapi juga harus mencakup semua wilayah yang dimaksud oleh desa. Hanya saja pembangunan di wilayah Indonesia masih mengalami ketimpangan, ada daerah yang lebih maju sementara daerah lain masih jauh tertinggal. Di sini kita membutuhkan upaya maksimal dari pemerintah untuk membantu memperkenalkan ekonomi rakyat di kawasan itu ke negara-negara asing dan pasar internasional. Dan juga perlu mendorong semua sektor ekonomi di daerah agar lebih berkualitas. Karena apa yang ditemukan banyak barang atau produk dari luar negeri yang masuk (impor) ke Indonesia, misalnya impor bawang merah putih dengan alasan mencegah krisis pangan di tengah wabah korona ini merupakan pertanda bahwa produktivitas dan ekonomi rakyat melemah. Dalam makalah ini kita akan membahas semua hal itu.*

**Kata-Kata Kunci: Kekuatan ekonomi masyarakat, Kekuatan Ekonomi Negara, Daerah.**

## **Pendahuluan**

Pembuatan kebijakan luar negeri oleh pemerintah seringkali luput mempertimbangkan kepentingan rakyatnya. Negara seringkali hanya mementingkan bagaimana agar investasi asing masuk dan berjalan mulus ke dalam negeri. Padahal seharusnya negara menjadi penyambung lidah rakyat di level internasional dengan mengembangkan potensi ekonomi rakyat di dalam negeri. Dalam paper ini penulis akan mencoba meneliti mengenai betapa pentingnya kekuatan ekonomi rakyat dan solusi buat para praktisi di pemerintahan.

Menurut Karl Marx tentang lingkungan, alam dan manusia dalam buku yang ditulis oleh Jhon Bellamy Foster *“Ekologi Marx Materialisme dan Alam”* mengatakan tanah dan alam adalah bagian dari manusia yang sudah ada secara alamiah dan dapat digunakan untuk diolah sebaik-baiknya tanpa ada monopoli, sehingga semua dapat menggunakannya demi keuntungan bersama (Foster, J. B. 2000). Berdasarkan asumsi tersebut, penulis berpendapat agar tidak terjadi monopoli diperlukan suatu pengawasan oleh pemerintah. Dalam sebuah negara modern, mereka yang memiliki kuasa ini adalah Pemerintah (*Government*), sedangkan polisi dan tentara adalah instrumen alat kekuasaan negara sebagai penjamin kehidupan dan keamanan rakyat. Sehingga sudah sewajarnya kalau harus ada rasa saling menjaga dan memiliki dalam sebuah bangsa dan negara yang besar.

Jika dilihat dari sisi historis, pada abad ke-17 dan masa Indonesia di bawah kolonialisme telah mengenal adanya sistem feodal atau penguasaan sosial dan politik berpusat yang pada tuan tanah atau bangsawan yang diberikan langsung oleh penguasa (Raja, Ratu atau Pemerintah Kolonial). Para pemilik tanah ini memiliki otoritas penuh atas tanah dan produk turunannya, serta dapat memperlakukan apa saja terhadap aset produksi, termasuk tanah usaha ataupun pekerja. Eksploitasi dari tuan tanah ini menimbulkan berbagai dampak buruk bagi salah satunya kemiskinan. Di era globalisasi seperti sekarang ini, unsur-unsur feodalisme masih mudah ditemui. Misalnya ketika rakyat didorong oleh pemerintah untuk menjual tanahnya kepada investor, dengan iming-iming atau janji akan kemudahan mendapat pekerjaan atau beasiswa. Tetapi kenyataannya pekerja yang mana pemilik sebenarnya dari tanah itu terkadang digaji tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan dan apa yang dijanjikan sebelumnya tidak dipenuhi melainkan ditinggalkan. Contoh yang dapat dilihat adalah perebutan lahan antara rakyat dan perusahaan kelapa sawit seperti di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dan Boven Diogel, Papua. Dampaknya, rakyat semakin terisih dari tanah dan kehidupan mereka.

Di tengah pandemi COVID-19 ini, kekuatan ekonomi rakyat sangat dibutuhkan karena menjadi salah satu aktor penting dalam ketahanan ekonomi nasional. Penulis memilih berfokus pada kekuatan ekonomi rakyat, karena elemen ini berperan penting untuk Indonesia. Ekonomi rakyat membantu perekonomian Indonesia di era globalisasi, yang ditandai dengan keterbukaan pasar semakin terbuka sehingga perlu ada kesadaran untuk meningkatkan kemampuan penggerakannya. Tentunya kemampuan itu harus didukung dengan kebijakan yang berorientasi kepada rakyat. Di sisi lain, kemampuan ekonomi rakyat juga terkadang bertabrakan dengan ide liberalisasi ekonomi yang lebih memberikan ruang pada pasar bebas dan berkurangnya intervensi negara kepada individu dalam menjalankan ekonominya (Morrissey & McGillivray 1999). Liberalisasi ekonomi memang dapat menguntungkan, pemain yang umumnya kuat secara modal, namun disaat yang bersamaan terdapat individu-individu yang terpinggirkan atau tersingkir dari sumber daya ekonomi. Dengan paradigma ini para pembuat kebijakan harus matang dalam memikirkan sebuah hubungan luar negeri yang lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dalam artikel ini akan dibahas secara mendetail mengenai relasi antara ekonomi rakyat dan kebijakan pemerintah.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kepentingan nasional yang semakin kompleks, negara harus mengupayakan kekuatan ekonomi rakyat yang berdampak langsung kepada ketahanan ekonomi nasional. Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal atau *Local Economic Development* (LED) diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat mulai dijalankan oleh pemerintah untuk merespon tantangan globalisasi dan desentralisasi kekuasaan di level lokal. Pengembangan ekonomi lokal dapat dipahami lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, namun juga berperan mempromosikan partisipasi dialog lokal dan orang-orang dan sumber daya mereka untuk pekerjaan yang lebih baik serta perbaikan kualitas hidup. Dengan membangun suatu ketahanan lokal satu keuntungan yang didapatkan adalah sifat ketidaktergantungan akan negara lain atau independen. Ketika negara itu dapat menjadi negara yang tidak bergantung pada negara lain maka tidak akan ada kemiskinan karena dapat memproduksi kebutuhannya sendiri dan menjualnya.

### Metode Penelitian

Dalam penelitian kali ini akan digunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian. Penelitian ini juga akan menggunakan paradigma pasar bebas (*Free Market*) yang memiliki pengaruh baik dan buruk terhadap masyarakat. Data yang digunakan berupa penelitian-penelitian terdahulu terkait topik pembahasan yaitu berupa jurnal, buku ataupun website. Dalam penyampaian data akan bersifat deskriptif.

### Temuan dan Pembahasan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan per kapita Indonesia meningkatkan secara signifikan selama 28 tahun terakhir. Pada periode 2000-2004, pendapatan per kapita Indonesia hanya sedikit di atas US\$ 1.000. Kemudian, rata-rata pendapatan per kapita melonjak 95 persen pada periode 2005-2009 menjadi sekitar US\$2.000. Pada periode 2010-2014, rata-rata pendapatan per kapita menanjak 76,25 persen menjadi US\$3.563,8. Sementara, selama periode 2015-2018 atau era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, peningkatan yang tercatat hanya 1,42 persen dari rata-rata periode 2010-2014, yakni sebesar US\$ 3.616,5. Dengan capaian tersebut, berdasarkan kategorisasi Bank Dunia, Indonesia berada pada kategori negara berpendapatan menengah bawah selama empat tahun terakhir seperti yang tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 1: Pendapatan Per Kapita Indonesia (Periode 2000- 2016)**

No	Pendapatan Per Kapita (PDP).	Periode.
1.	US\$1.000.	2000-2004
2.	US\$2.000.	2005-2009 (95%)
3.	US\$3.563,8.	2010-2014 (76,25%)
4.	US\$3.616,5.	2015-2016 (1,42%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (BPSI)

Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia telah menciptakan kemakmuran semu bagi masyarakat. Padahal kemakmuran merupakan salah satu cita-cita kemerdekaan bangsa yang tertuang dalam pembukaan konstitusi. Secara teori pendapatan per kapita bisa digunakan sebagai salah satu instrumen untuk melihat tingkat kemakmuran suatu negara. Pendapatan

per kapita merupakan total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dibagi jumlah penduduk. Tetapi sayangnya, pertumbuhan pendapatan per kapita di Indonesia cenderung stagnan selama empat tahun terakhir. Salah satu penyebabnya adalah tingkat produktifitas masyarakat yang sangat rendah dan Indonesia menjadi negara konsumtif serta belum bisa menjadi produsen. Di sini dapat dilihat bahwa adanya pelemahan kekuatan ekonomi rakyat karena sangat bergantung kepada impor.

### **Sistem dan Kekuatan Ekonomi Rakyat di Indonesia**

Jika terdapat pertanyaan mengenai faktor apakah yang menyebabkan maju dan berkembangnya perekonomian di suatu negara, maka salah satu jawabannya adalah sistem ekonomi yang berlaku di negara tersebut. Sistem ekonomi secara etimologis diartikan sebagai mekanisme yang mengatur perekonomian secara menyeluruh. Sehingga, suatu aktivitas ataupun kegiatan perekonomian di suatu negara tidak akan pernah lepas dari sistem ekonomi yang mendasarinya. Lantas sejauh mana negara kita menerapkan konsep sistem ekonomi yang terbaik bagi bangsanya mengingat, tersedia berbagai alternatif sistem ekonomi di level global? Jika kita telusuri lebih jauh lagi, sistem ekonomi yang berlaku di suatu negara tidak pernah terlepas dari karakteristik serta budaya bangsa itu sendiri. Misalnya, Indonesia dengan karakteristik manusianya yang menganut budaya Timur yang kental dengan kolektivitas komunal, rasa toleransi dan tolong menolong sejak dulu, maka sistem ekonomi yang cocok untuk kita terapkan adalah sistem ekonomi kerakyatan.

### **Ekonomi Kerakyatan dan Pancasila**

Drs. Mohammad Hatta adalah salah seorang tokoh pendiri bangsa yang sekaligus berperan sebagai penggagas sistem ekonomi kerakyatan. Tokoh kelahiran Bukit Tinggi, 12 Agustus 1902 tersebut dikenal sebagai bapak koperasi yang terkenal dengan asas kekeluargaannya. Jadi koperasi dengan asas kekeluargaan merupakan salah satu perwujudan dari ekonomi kerakyatan. Salah satu pokok pemikiran Mohammad Hatta adalah membangun ekonomi nasional berdasarkan ideologi dan budaya bangsa. Ideologinya adalah Pancasila, sedangkan budayanya adalah gotong royong atau solidaritas. Pada prinsipnya, ekonomi kerakyatan berusaha untuk tidak menganut sistem kapitalistis yang terlalu bergantung pada individual ataupun sistem sosialis yang mengganggu kolektivitas bersama di atas hak individu. Sistem ekonomi kerakyatan berusaha berdiri di antara keduanya, yakni pengakuan hak-hak individu dan kolektif yang berjalan secara seimbang. Artinya negara mengakui hak masing-masing individu selama tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat banyak.

Pada level global, Indonesia dihadapkan pada tantangan internasional dengan hegemoni kekuatan kapitalisme. Pada kondisi ini, Indonesia sedang menghadapi tantangan baik berbagai sektor, baik dari segi mental namun dari segi perekonomian. Jika mengacu pada data PDB selama lima tahun belakangan ini, Indonesia memang mengalami peningkatan pendapatan, namun perlu dikaji kembali apakah pendapatan menjadi suatu indikator tunggal di kesejahteraan masyarakat? Diperlukan perumusan indikator yang lebih komprehensif untuk memetakan kesejahteraan merata secara kolektif, seperti distribusi pendapatan di tengah masyarakat. Amat disayangkan ketika pertumbuhan ekonomi nasional meningkat tajam secara kumulatif namun hanya dinikmati oleh segelintir orang. Hal ini bertentangan dengan cita-cita pendiri negara yang mencita-citakan terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat luas. Pada kondisi ini dapat dilihat jelas ketimpangan sosial dan hilangnya keadilan ekonomi bagi masyarakat. Sementara itu, negara mengamanatkan agar keadilan sosial di bidang ekonomi merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkadang kita bertanya siapa yang paling bertanggung jawab atas kondisi ini? Terkait dengan kondisi tersebut, apabila terdapat pendapat yang memojokkan penyelenggara negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, penulis menilai pendapat ini kurang tepat. Kondisi ekonomi yang saat ini erat kaitannya dengan banyak faktor, terutama hegemoni kekuatan pasar global

dan perjanjian kerjasama ekonomi dengan pihak asing yang diratifikasi oleh pemerintah sebelumnya. Kebijakan ekonomi saat ini yang sedang berjalan saat ini tidak pernah lepas dari peran serta penyelenggara negara pada era sebelumnya. Jadi sangat tidak obyektif jika kondisi perekonomian saat ini disalahkan sepenuhnya kepada pemerintahan saat ini. Kondisi politik dan ekonomi global ini memiliki dampak pada kondisi perekonomian nasional. Karena pada tataran sistemik perekonomian global yang bercorak neoliberal ini, Indonesia tetap harus bekerjasama dengan negara asing karena berbagai pertimbangan dan efisiensi termasuk kekurangan SDM yang berkualitas dan ketersediaan modal.

Di balik itu semua, untuk mempertahankan kondisi perekonomian nasional dari kompetisi pasar bebas yang bercorak neoliberal yang sarat dengan adu kepentingan asing, maka ekonomi kerakyatan menjadi salah satu solusi bagi terciptanya ketahanan ekonomi yang tangguh. Penguatan konsep ekonomi kerakyatan bisa menjadi solusi alternatif atas adanya ketimpangan pendapatan serta ketidakadilan ekonomi yang sedang terjadi. Ekonomi kerakyatan mengandung arti bahwa rakyat menjadi tujuan dari serta tolok ukur dari proses berjalannya perekonomian nasional. Rakyat di sini bukan segelintir orang atau sekelompok golongan, namun meliputi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampe Merauke. Karena Bung Karno sendiri berkata bahwa, *“Kita mendirikan negara ini bukan untuk untuk suatu individu atau untuk golongan tertentu, namun buat semua.”* Memang ada beberapa anggapan bahwa ekonomi kerakyatan telah mati. Atau ada yang mengatakan ekonomi kerakyatan mustahil di abad 21 sekarang. Namun menurut penulis semua itu bisa dilakukan jika kita memiliki tekad yang sama untuk memajukan perekonomian rakyat mulai dari pemegang kekuasaan sampai kepada masyarakat.

Dalam kekuatan ekonomi rakyat di Indonesia juga ada dikenal dengan istilah Ekonomi Pancasila suatu istilah yang diperkenalkan oleh Emil Salim. Istilah ekonomi berbasis ideologi Pancasila ini baru muncul pada tahun 1967 dalam suatu artikel Dr. Emil Salim. Pembahasan lebih detail mengenai ekonomi Pancasila 1979, Emil Salim membahas kembali yang dimaksud dengan Ekonomi Pancasila. Pada dasarnya Ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi, setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan memusat. Secara sederhana Ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau “ekonomi pasar terkendali” (Tjakawerdaja 2017). Ada istilah-istilah lain yang mendekati pengertian Ekonomi Pancasila seperti “Sistem Ekonomi Campuran,” maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme” atau “sistem ekonomi jalan ketiga.” Tetapi kedua istilah itu banyak variasinya di dunia. Sistem ekonomi yang berlaku di Amerika Utara dan Eropa Barat contohnya dapat disebut sebagai sistem ekonomi campuran, karena sudah tidak murni kapitalis, tetapi bukan pula sosialis. Tapi persepsi umum menilai bahwa sistem ekonomi AS adalah sebuah model ekonomi kapitalis yang paling representatif, sedangkan sistem ekonomi di Uni Soviet (dahulu sampai 1991) atau Republik Rakyat Cina (RRC) adalah model ekonomi sosialis yang paling baku. Barangkali yang lebih mendekati model ekonomi campuran adalah sistem ekonomi Inggris atau negara-negara Eropa Barat yang lazim disebut juga sebagai negara kesejahteraan (*Welfare State*). Sistem ekonomi kerakyatan yang terkandung di dalamnya seharusnya dapat menjadi sebuah titik pendorong bagi perekonomian di Indonesia saat ini. Sistem Ekonomi Pancasila ini juga didasarkan atas rasa senasib dan sepenanggungan dibawah sistem kolonialisme.

Istilah Ekonomi Pancasila yang pertama kali diperkenalkan oleh Emil Salim, kemudian lebih lekat dengan nama Mubyarto. Nama Mubyarto memang dikenal sebagai salah satu tokoh yang sangat serius mengembangkan dan memperjuangkan perkembangan gagasan Ekonomi Pancasila. Bila Emil Salim mempergunakan istilah tersebut dengan merujuk pada gagasan mengenai sistem perekonomian atau politik perekonomian yang berusaha memberikan

landasan bagi langgengnya praktik ekonomi Orde Baru, maka itu Mubyarto menggunakannya sebagai sebuah bentuk teori kritis untuk mengkritik teori ekonomi Neoklasik yang dipergunakan Orde Baru sebagai dasar dalam menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi. Kritik Mubyarto antara lain adalah bahwa ekonomi Neoklasik tidak mampu memberikan ide distribusi kekayaan secara merata yang konsekuensinya kontradiktif dengan ide keadilan sosial sebagai puncak tujuan bangsa.

Pada saat ini sistem ekonomi Pancasila yang pernah dikonsepsikan oleh tokoh tokoh bangsa seperti menjauh dari nilai utamanya, yakni kebersamaan. Menurunnya nilai-nilai pancasila dapat dilihat dari corak kebijakan ekonomi yang semakin menunjukkan ketergantungan Indonesia kepada impor. Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini, perekonomian Indonesia sedang mengalami penurunan atau bahkan stagnansi, dengan salah satu faktor utamanya adalah lemahnya produktivitas ekonomi rakyat. Selain itu, kelesuan ekonomi ini juga diperparah dengan pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak masyarakat, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Dalam kondisi stagnansi ekonomi dan kondisi wabah, pelaku ekonomi yang paling rentan dan membutuhkan stimulus intervensi pemerintah dalam krisis ini adalah masyarakat, khususnya mereka yang bergerak dalam usaha di skala mikro, kecil dan menengah (UMKM).

### **Melemahnya Ekonomi Rakyat di Indonesia.**

Proses melemahnya perekonomian rakyat tidak bisa terlepas dari ketidakmampuan dalam bersaing dengan produk-produk asing. Menurut Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) berpendapat Indonesia tidak akan bisa keluar dari ketergantungan impor pangan. Ketua Umum AB2TI Dwi Andreas Santosa mengatakan saat ini kebutuhan pangan ditopang oleh impor sebesar 22 juta ton untuk 21 komoditas tanaman pangan. Dengan tegas dia mengucapkan siapapun nanti yang akan memerintah harus menghadapi kenyataan tersebut.

*"kita juga perlahan sudah masuk ke impor trap [jebakan impor] sehingga ketika kita menghentikan impor contoh jagung. Pada 2016 diturunkan dari 3,5 juta ton menjadi 1,3 juta ton, akibatnya bahan substitusi melonjak tinggi, yaitu gandum. Impor gandum yang 100% tidak bisa kita produksi melonjak.*

Berdasarkan dari pernyataan yang dikutip di atas, ketergantungan impor komoditas pertanian menjadi tanda peringatan bagi Indonesia untuk lebih mandiri, salah satu caranya dengan meningkatkan kemampuan rakyat melalui unit-unit usaha masyarakat.

### **Perampasan Lahan**

Istilah *land grabbing* atau perampasan tanah pertama kali dikemukakan oleh sebuah lembaga pertanian GRAIN di Spanyol, pada tahun 2008. Istilah ini digunakan untuk menyebut mengenai pengambilan tanah-tanah pertanian oleh perusahaan besar melalui investasi agribisnis. Saat ini istilah *land grabbing* sudah semakin populer bahkan telah menjadi perhatian berbagai lembaga PBB seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD). Hal tersebut menyebabkan terjadinya gelombang investasi ke sektor tanaman pangan di seluruh dunia. Di Indonesia salah satu yang mengadu peruntungan di sektor pangan ini adalah Bin Laden Group. Pada tahun 2008 mereka telah menyatakan akan menginvestasikan US\$ 2 miliar untuk pembukaan *food estate*<sup>1</sup> di Lampung dan Sulawesi Tengah. Sebelumnya grup yang sama telah berencana menggelontorkan US\$ 4,37 miliar pada proyek mereka berupa pembukaan lahan pertanian pangan seluas 500.000 hektare di Merauke, Papua. Selain investor asing

---

<sup>1</sup> Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan.

perusahaan raksasa nasional seperti Medco Energi, Sinar Mas Group, dan Artha Graha juga melakukan hal serupa, perusahaan-perusahaan ini memutuskan terjun dalam bisnis pangan dengan membuka food estate seluas 585.000 hektar di daerah Merauke juga. Pemerintah yang melihat hal ini sebagai peluang usaha baru dan kesempatan untuk mengundang investor ke sektor pertanian pangan yang selama ini tidak menarik minat dan umumnya dikelola oleh keluarga-keluarga petani mendukung perkembangan fenomena yang terjadi ini melalui sejumlah kebijakan baru yang dikeluarkan.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis berpendapat bahwa salah satu penyebab melemahnya ekonomi rakyat adalah terasingnya rakyat dari sumber daya utama ekonomi utama yakni tanah atau lahan. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat dipisahkan dari tanahnya sehingga akan sangat berdampak luas bagi kehidupan jika mereka dipisahkan. Selain itu, perampasan lahan juga berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. Jika tidak ditangani dengan baik, konflik sosial dapat berdampak luas dan menimbulkan korban jiwa. Penggambaran kondisi ini dapat dilihat pada film dokumenter *The Mahuzes*.<sup>2</sup> Film ini mencoba menyajikan narasi sosial yang nyata atas pemaksaan sebuah program nasional kepada masyarakat lokal dengan dalih untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional dan global. Pada film ini, penonton disuguhkan informasi mengenai kondisi Papua yang hendak diproyeksikan menjadi lumbung pangan dan energi berbasis perusahaan (industri). Kebijakan yang diterapkan di Papua ini merupakan salah satu contoh pengasingan masyarakat dari sumber daya alamnya. Masyarakat Papua, khususnya suku-suku adat, yang terbiasa hidup dari alam sekarang harus tersisih. Selain itu, salah satu dampak perampasan lahan adalah perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan, yang berdampak langsung pada peningkatan angka pengangguran. Menurut Karl Marx dan Engels pembagian pekerjaan dalam sebuah bangsa mendorong pertama kali pemisahan perkotaan dan pedesaan dan timbul konflik antar keduanya (Foster 2000). Efek dari pembagian pekerjaan dan tren perpindahan penduduk dari desa ke kota tersebut membuat masyarakat merasa tidak memiliki masa depan yang menguntungkan di pedesaan karena lahan yang tersedia telah diambil oleh perusahaan.

Menanggapi kondisi tersebut, penulis berpendapat bahwa pemerintah seyogyanya harus lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan, untuk meminimalisir terjadinya *land grabbing*. Karena efek dari suatu kebijakan akan berdampak langsung kepada rakyat dan kondisi sosial ekonomi Indonesia sendiri secara keseluruhan. Semakin tinggi jarak kuasa antara pemilik modal, semakin memperbesar peluang eksploitasi pada rakyat, selaku pihak yang seringkali dirugikan dalam proses perampasan lahan. Hal ini menjadi salah satu penguat argumen penulis yang menggarisbawahi pentingnya perumusan kebijakan ekonomi rakyat yang berorientasi kekeluargaan dan berdasarkan Pancasila.

### **Peran Pemerintah dalam Kekuatan Ekonomi Masyarakat**

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, visi pembangunan nasional 2005-2025 yang ditetapkan adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 8 misi pembangunan nasional yang satu di antaranya adalah mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. Visi "Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur" merupakan gagasan besar dan komitmen penyelenggara negara dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, kuat, mandiri, modern, berkeadilan dan berkeadaban serta berkesejahteraan. Visi ini merupakan kerangka dasar dan strategis dalam menjabarkan tujuan negara yang telah dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

---

<sup>2</sup> Film dokumenter *THE MAHUZES* merupakan salah satu arsip sekaligus catatan perjalanan yang direkam dengan sangat apik oleh kolektif Watchdog, sebagai serpihan dari 'Ekspedisi Indonesia Biru' yang dirilis pada 28 Agustus 2015.

memajukan kesejahteraan umum. Komitmen ini secara normatif telah dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945, sehingga secara konstitusional menjadi dasar dan rujukan dalam menetapkan arah kebijakan di bidang pembangunan ekonomi yang oleh Jimly Assididqie<sup>3</sup> disebut sebagai konstitusi ekonomi.

Pasal 33 UUD 1945 berada di bawah Bab XIV dengan perubahan judul pada perubahan keempat menjadi 'Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial'. Dari pasal ini sudah sangat jelas bahwa tujuan dari sistem perekonomian nasional adalah untuk menyejahterakan rakyat. Menurut penulis, sudah seharusnya pemerintah berfokus kepada sektor penguatan ekonomi rakyat dan menggunakan amanah UUD sebagai acuan. Kebijakan yang berorientasi pada penguatan ekonomi rakyat akan mendorong Indonesia semakin mandiri dalam perekonomian. Kondisi ketergantungan akan impor, selaras dengan pernyataan Ketua Umum AB2TI Dwi Andreas Santosa, yang memprediksi saat ini kebutuhan pangan nasional ditopang oleh impor senilai 22 juta ton untuk 21 komoditas tanaman pangan. Dwi Andreas Santosa berpendapat bahwa siapapun nanti yang akan memerintah harus menghadapi kenyataan tersebut. Selain itu, Dwi juga menegaskan akan pentingnya penguatan ekonomi nasional yang mana yang harus dimiliki oleh rakyat.

Pengembangan ekonomi lokal menjadi salah satu agenda prioritas dari pemerintah Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro yang menyebutkan bahwa ekonomi lokal mampu berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi nasional (Antara 2017). Pengembangan ekonomi lokal merupakan penopang utama kinerja perekonomian nasional yang juga berkaitan erat dengan kinerja pemerintah daerah. Karena sifatnya yang lintas sektor, realisasi kebijakan ini harus memperhatikan pemerataan akses ekonomi harus bisa menjangkau usaha-usaha rakyat yang ada di daerah. Selain itu, untuk mendukung efektivitas kebijakan, diperlukan koordinasi komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Lebih lanjut, pengembangan ekonomi lokal ini tidak serta merta menutup akses kerjasama dengan negara lain. Transfer teknologi ataupun pengembangan kapasitas dengan pihak luar justru diperlukan, sehingga kerjasama perdagangan tidak hanya berorientasi pada kebijakan impor atau penjualan komoditas mentah. Contoh kerjasama internasional yang berfokus pada pengembangan ekonomi lokal, adalah kerjasama yang diinisiasi pemerintah Indonesia adalah dengan Kanada, dengan judul kegiatan National Support for Local Investment Climates/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSLIC/NSELRED). Inisiatif tersebut diwujudkan dengan program Dana Inovasi Responsive atau Responsive Innovative Fund (RIF) senilai Rp.18 Miliar dengan memilih enam usulan inovasi usaha dari enam kabupaten setiap tahunnya yang telah berlangsung dari 2018-2020. Ini adalah salah satu contoh peran pemerintah yang mana dapat menolong perekonomian rakyat melalui bantuan dana.

### **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan, yakni sebagai berikut. 1) Usaha Mikro. Usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang. 2) Usaha Kecil. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam undang-undang. 3) Usaha Menengah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan

---

<sup>3</sup> Jimly Assididqie, telah digunakan istilah konstitusi ekonomi (economic constitution) untuk membedakannya dari pengertian konstitusi politik (political constitution) dan konstitusi sosial (social constitution). Dalam perspektif konstitusi ekonomi, diskusi mengenai ideologi ekonomi tidak diperlukan.

oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pengertiannya dapat dikatakan UMKM sangat penting dalam peningkatan perekonomian negara. Sehingga peran pemerintah sangat diperlukan untuk keberlangsungan. Setidaknya, ada 3 peran UMKM yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil. Tiga peran tersebut adalah:

### **Sarana Mengentaskan Masyarakat dari Jurang Kemiskinan**

UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sektor usaha ini dikenal dengan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi tercatat dalam data milik Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2011, yang menyebutkan lebih dari 55,2 juta unit UMKM mampu menyerap sekitar 101,7 juta orang. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar 57,8 juta unit UMKM dengan jumlah tenaga kerja mencapai 114 juta orang.

### **Sarana untuk Meratakan Tingkat Perekonomian Rakyat Kecil**

UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan jenis usaha bermodal besar, UMKM tersebar di berbagai tempat, bahkan termasuk di daerah yang jauh dari ekspansi industri skala besar sekalipun. Keberadaan UMKM di 34 provinsi yang ada di Indonesia mampu memperkecil jurang ekonomi antara yang miskin dengan kaya. Selain itu, masyarakat kecil tak perlu berbondong-bondong pergi ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak.

### **Memberikan Pemasukan Devisa bagi Negara**

Peran UMKM berikutnya yang tidak kalah penting adalah, memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa. Saat ini, UMKM Indonesia memang sudah sangat maju. Pangsa pasarnya tidak hanya skala nasional, tapi internasional. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2017 menunjukkan tingginya devisa negara dari para pelaku UMKM. Angkanya pun sangat tinggi, mencapai Rp88,45 miliar. Angka ini mengalami peningkatan hingga delapan kali lipat dibandingkan tahun 2016.

Dengan tiga peran yang dimilikinya tersebut, tidak salah kalau para pelaku UMKM tidak dapat dipandang sebelah mata. Atau dengan kata lain ekonomi rakyat sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung UMKM adalah dengan mempromosi produk-produknya di kanca Internasional agar semakin dikenal.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan data dan kenyataan yang ada penguatan ekonomi rakyat sangat diperlukan karena akan berdampak besar bagi bangsa dan negara. Selain ekonomi keuntungan yang didapatkan dengan mempercayai kekuatan rakyat dapat menciptakan kestabilan nasional. Saran daripada penulis kepada para pemangku kekuasaan untuk dapat lebih mengutamakan rakyat tanpa harus mengorbankan dengan perampasan lahan.

### **Ucapan Terimakasih**

Ucapan terimakasih saya ucapkan kepada Komunitas Orang Muda Papua Kreatif (KOMPAK) Jakarta, karena telah membantu dalam diskusi pembuatan tulisan atau makalah ini.

## Referensi

### Jurnal

- Amila, D., 2020. Pengertian, Jenis dan Perkembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Entreprenur*, 1(2), pp. 1-4.
- AH, Z., 2016. Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi. *Jurnal Hukum*, 03(2), pp. 1-26.
- Foster, J. B., 2000. Ekologi Marx Materialisme dan Alam. In: *Ekologi Max Materialisme dan alam*. New York: Aliansi Muda Progresif, pp. 122-123.
- Tjakawerdaja, S. s. P. S. L. B. P. M. K. L. a. s., 2017. Sistem Ekonomi Pancasila. *Divisi Buku Perguruan Tinggi*, 1(2), pp. 65-82.

### Sumber Eletronik

- BPS, 2019. *bps.go.id*. [Online] Available at:  
<<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/09/16/1573/ekspor-agustus-2019-mencapai-us--14-28-miliar--impor-agustus-2019-mencapai-us--14-20-miliar--turun-8-53-persen-dibanding-juli-2019-.html#:~:text=Impor%20%3A,2018%20turun%2015%2C60%20persen.>>  
[Diakses pada 18 Juni 2020]
- Club, U. S., 2010. *sociologyknowledgeseeker.wordpress*. [Online]  
<<https://sociologyknowledgeseeker.wordpress.com/2010/01/14/feodalisme-modern-di-indonesia/>> [Diakses pada 24 Juni 2020]
- Fresky., M. A., 2014. *news.okezone.com*. [Online]  
<<https://news.okezone.com/read/2014/06/28/95/1005321/menghidupkan-ekonomi-kerakyatan>> [Diakses pada 17 Juni 2020].
- Grab, F. L., 2008. *farmlandgrab.org*. [Online] Available at:  
<<https://www.farmlandgrab.org/post/view/2459-bin-laden-group-to-invest-rp14-trillion-in-sulawesi>> [Diakses pada 17 Juni 2020].
- Gumilar, P., 2019. *ekonomi.bisnis.com*. [Online]  
<<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190214/99/888809/ab2ti-indonesia-tidak-bisa-lepas-dari-ketergantungan-impor-pangan>> [Diakses pada 24 Juni 2020].
- Gumilar, P., 2019. *ekonomi.bisnis.com*. [Online]  
<<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190214/99/888809/ab2ti-indonesia-tidak-bisa-lepas-dari-ketergantungan-impor-pangan>> [Diakses pada 18 Juni 2020].
- Indonesia, K. K. d. U. K. d. M. R., 2020. *depkop.go.id*. [Online]  
<<http://www.depkop.go.id/data-umkm>> [Diakses pada 24 Juni 2020].
- Indonesia, S. P., 2009. *spi.or.id*. [Online] <<https://spi.or.id/perampasan-tanah-di-indonesia/>> [Diakses pada 15 Juni 2020].
- Organization, I. L., 2020. *ilo.org*. [Online] <  
[https://www.ilo.org/empent/areas/WCMS\\_093862/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/empent/areas/WCMS_093862/lang--en/index.htm)> [Diakses pada 17 Juni 2020].

- Pamungkas, T. K., 2017. *lsfcogito.org*. [Online]  
<[http://lsfcogito.org/ekonomi\\_kerakyatan\\_mubyarto\\_sosialisme-indonesia/#:~:text=Namun%2C%20Ekonomi%20Kerakyatan%20sudah%20sering,berorientasi%20pada%20nilai%2Dnilai%20Pancasila.&text=Secara%20umum%20dikatakan%20bahwa%20tujuan,masyarakat%20yang%20adil%20da](http://lsfcogito.org/ekonomi_kerakyatan_mubyarto_sosialisme-indonesia/#:~:text=Namun%2C%20Ekonomi%20Kerakyatan%20sudah%20sering,berorientasi%20pada%20nilai%2Dnilai%20Pancasila.&text=Secara%20umum%20dikatakan%20bahwa%20tujuan,masyarakat%20yang%20adil%20da)>  
[Diakses pada 24 Juni 2020].
- Project, T. G., 2019. *Bagaimana Perusahaan Memanipulasi Adat Untuk Merampas Tanah di Papua*. [Online] < <https://geckoproject.id/bagaimana-perusahaan-memanipulasi-adat-untuk-merampas-tanah-di-papua-b228502f8dc>> [Diakses pada 19 Juni 2020].
- R, H. D., 2017. Portal Online *kompasiana.com*. [Online]  
<<https://www.kompasiana.com/hikhman/599eabfae728e442d60622e2/3-peran-penting-umkm-penggerak-penting-ekonomi-indonesia>>  
[Diakses pada 20 Juni 2020].
- Yuli Yanna Fauzie, C. I. |. S. 2., 2019. *CNN Indonesia*. [Online]  
< <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190723142610-532-414710/percuma-ekonomi-tumbuh-kalau-kemakmuran-semu>>  
[Diakses pada 24 Juni 2020].